

Kata Pengantar

Sebagai provinsi tempat aktivitas percontohan UN-REDD Programme Indonesia, Sulawesi Tengah berusaha melakukan yang terbaik untuk menyongsong pelaksanaan REDD+ (*reducing emissions from deforestation and forest degradation*). Seperti pembaca ketahui dari *Newsletter* edisi sebelumnya, banyak aktivitas telah dilaksanakan di Sulawesi Tengah untuk mempersiapkan pelaksanaan REDD+ baik dari penyusunan strategi daerah, metodologi, serta peningkatan kapasitas bagi pengambil keputusan maupun masyarakat.

Tiga bulan terakhir merupakan bulan-bulan yang padat kegiatan bagi Sulawesi Tengah, terutama bagi Kelompok Kerja (Pokja) REDD+ Sulawesi Tengah, yang diawali dengan pertemuan dengan Gubernur Sulawesi Tengah yang baru dilantik (Juni 2011), Bapak Drs H. Longki Djanggola, MSi. Hal-hal yang lebih konkret menjadi semakin nyata di depan mata, dan membutuhkan upaya serta persiapan yang matang. Di antara beberapa persiapan itu adalah Penyusunan Draf Strategi Daerah REDD+, Panduan Persetujuan yang Didasari Informasi Awal Tanpa Paksaan (*Free, Prior and Informed Consent* atau FPIC), sistem Pemantauan, Pelaporan, dan Verifikasi (*Monitoring, Reporting and Verification* atau MRV), serta Pemilihan Kabupaten pilot.

Kami mengajak pembaca untuk mengikuti perkembangan yang terjadi di Sulawesi Tengah melalui *Newsletter* edisi khusus ini. Kami berharap dukungan semua pihak, termasuk pembaca, untuk mensukseskan program REDD+ di Sulawesi Tengah.



Ir. H. Nahardi, MM
Kepala Dinas Kehutanan Daerah
Selaku Ketua Kelompok Kerja
Sulawesi Tengah



**Komitmen
Pemerintah
Sulawesi Tengah
terhadap REDD+**



Dalam rangka mendukung pelaksanaan program REDD+ (*reducing emissions from deforestation and forest degradation plus* atau penurunan tingkat emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan plus) di Provinsi Sulawesi Tengah, dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) REDD+ Sulawesi Tengah sebagai wujud konkret komitmen Sulawesi Tengah. Kelompok Kerja ini kemudian mengembangkan infrastruktur untuk kesiapan pelaksanaan REDD+.



Gubernur Sulawesi Tengah, Drs. H. Longki Djanggola, Msi., menyambut baik program REDD+ di Sulawesi Tengah karena sesuai dengan visi pemerintah daerah yang baru di bawah pimpinannya. Gubernur mempunyai komitmen untuk mensejajarkan Sulawesi Tengah dengan provinsi lain yang lebih maju di kawasan Indonesia Timur dalam pengembangan agribisnis dan kelautan. Visi Gubernur terkait kehutanan tertuang dalam Agenda Pembangunan Daerah V yang mencakup: "pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan hutan secara optimal dan berkelanjutan (*sustainable forest management*).". Di samping itu, untuk memperkecil risiko bencana dan upaya melindungi rakyat,

Pemerintah Daerah mengembangkan upaya mitigasi dan penanggulangan bencana, rehabilitasi dan konservasi lingkungan hidup, di kawasan pesisir dan laut.

Sampai saat ini pemerintah Sulawesi Tengah melalui Dinas Kehutanan telah bekerja sama dengan Pokja REDD+ Sulawesi Tengah dalam berbagai kegiatan persiapan REDD+. Kegiatan-kegiatan yang berupa pembangunan kapasitas itu telah menghasilkan antara lain Draf Strategi Daerah, Persiapan Tingkat Emisi Referensi (*Reference Emissions Level* atau REL), serta Pemantauan, Pelaporan, dan Verifikasi (*Monitoring, Reporting and Verification* atau MRV) untuk Provinsi Sulawesi Tengah.

Daftar Isi

| | | | |
|--|---|---|---|
| Kata Pengantar | 1 | Peneliti Muda di Sulawesi Tengah | 4 |
| Komitmen Pemerintah Sulawesi Tengah terhadap REDD+ | 1 | Mengkomunikasikan REDD+ dalam Uji Coba Panduan Persetujuan atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan..... | 4 |
| Pokja REDD+ Sulteng | 2 | Kunjungan Kerja Pemerintah Daerah Sumatera Barat Ke Palu..... | 5 |
| Lokakarya Pemantauan, Pelaporan, dan Verifikasi bagi Unieversitas-universitas di Indonesia Timur | 3 | Penilaian Pengembangan Kapasitas | 5 |
| Pakar/peneliti/dosen sebagai perwakilan dari 10 universitas yang hadir di Lokakarya MRV | 3 | Partisipasi Provinsi Sulawesi Tengah di COP17, Durban, Afrika Selatan..... | 6 |

Pokja REDD+ Sulteng

DEWAN PENASIHAT:



Nama : Drs H. Longki Djanggola, MSi
Posisi di Pokja : Dewan Penasihat
Jabatan/Instansi : Gubernur Sulawesi Tengah



Nama : H. Soedarto, SH, MHum
Posisi di Pokja : Dewan Penasihat
Jabatan/Instansi : Wakil Gubernur Sulawesi Tengah

KOORDINATOR:



Nama : Drs. Nadjib Godal, MSi
Posisi di Pokja : Ketua Umum
Jabatan/Instansi : Asisten bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekertaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah



Nama : Ir. Nahardi, MM
Posisi di Pokja : Ketua 1
Jabatan/Instansi : Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulteng



Nama : Ir. Harijoko Siswo Prasetyo, MM
Posisi di Pokja : Ketua 2
Jabatan/Instansi : Kepala Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu



Nama : Syahrial Labeso SH, MSi
Posisi di Pokja : Ketua 3
Jabatan/Instansi : Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulaesi Tengah



Nama : Ir. Susilowati, MSc
Posisi di Pokja : Sekretaris 1
Jabatan/Instansi : Sekertaris Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah



Nama : Carnoto, S.Hut, MM
Posisi di Pokja : Sekretaris 2
Jabatan/Instansi : Kepala Sub Bagian Perencanaan Program Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah



Nama : Ir. Didi Suharyadi
Posisi di Pokja : Bendahara 1
Jabatan/Instansi : Regional Facilitator UN-REDD Programme Indonesia



Nama : Dodi, S.Hut, MSi
Posisi di Pokja : Bendahara 2
Jabatan/Instansi : Staf Bidang Perencanaan Dinas Kehutanan Provinsi Sulteng

KELOMPOK KERJA:



Nama : Dr. Ir. Bunga Elim Somba, MSc
Posisi di Pokja : Ketua Pokja I Bidang Kebijakan Terkait Implementasi REDD+ (Strategi Daerah)
Jabatan/Instansi : Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah



Nama : Dr. Ir. Abdul Rauf, MSc
Posisi di Pokja : Ketua Pokja II Bidang Kelembagaan dan Metodologi
Jabatan/Instansi : Dosen Universitas Tadulako



Nama : Ir. Pepi Saeful Jalal, MP
Posisi di Pokja : Ketua Pokja III Bidang *Demonstration Activities*
Jabatan/Instansi : Kepala Bidang Bina Usaha Hasil Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sulteng



Nama : Syafri Alikadri, SH
Posisi di Pokja : Ketua Pokja IV Bidang FPIC, Pemberdayaan dan Pengembangan Kapasitas Daerah dan Masyarakat
Jabatan/Instansi : Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sulteng

Lokakarya Pengukuran, Pelaporan, dan Verifikasi bagi Universitas-universitas di Indonesia Wilayah Timur

Universitas merupakan pusat ilmu pengetahuan juga tempat berkumpulnya para ahli dan ilmuwan. Di situlah penelitian-penelitian dan publikasi ilmiah dihasilkan. Sayangnya, peran universitas dan para ilmuwan itu tidak selalu diketahui publik. Terkait dengan aktivitas REDD+, partisipasi mereka belum dimaksimalkan dan produk-produk yang mereka hasilkan belum dimanfaatkan.

Untuk memaksimalkan peran universitas dalam kegiatan REDD+, diadakanlah lokakarya bertema Pengukuran, Pelaporan, dan Verifikasi (*Measurement, Reporting and Verification* atau MRV) pada tanggal 28 September 2011 di Palu, Sulawesi Tengah. Lokakarya ini dihadiri oleh sekitar 60 peserta yang sebagian besar merupakan ilmuwan dari universitas-universitas di Indonesia wilayah timur, termasuk Palu. Universitas yang diwakili pada lokakarya tersebut

adalah Universitas Pattimura (Ambon), Universitas Hasanuddin (Makassar), Universitas Haluoleo (Kendari), Universitas Mulawarman (Samarinda), Universitas Lambung Mangkurat (Banjarbaru), Universitas Tanjungpura (Pontianak), dan Institut Pertanian Bogor (Bogor). Melalui lokakarya ini, diharapkan terbentuknya jejaring ilmiah yang bisa menggali produk-produk ilmiah penunjang REDD+, dan mengawali pengembangan sistem MRV sub nasional.



▲ dari kiri ke kanan: Dr. Ruandha Agung Sugadirman (Kementerian Kehutanan), Prof. Dr. Udiansyah, MS. (Universitas Lambung Mangkurat), Prof. Dr. I Negah Surati Jaya, MAgr. (Institut Pertanian Bogor), Dr. Ir. Fadjar Pambudhi, MSc. (Universitas Mulawarman)



▲ dari kiri ke kanan: Tim Boyle (Regional Technical Adviser, UN-REDD), Ima Yudin Rayaningtyas (Universitas Hiroshima), Dr. Ir. Abd. Rauf, Ms. (Ketua Pokja II REDD+ Sulawesi Tengah), Dr. Ir. Hermawan Indrabudi (Team Leader 2 bidang Metodologi, UN-REDD Programme Indonesia)

Pakar/peneliti/dosen sebagai perwakilan dari 10 universitas yang hadir di Lokakarya MRV Palu, 28 September 2011

| Nama | Penelitian | Institusi |
|-----------------------------|---|--|
| Prof. Dr. Ngakan Putu Oka | Kajian Ekologi, Konservasi dan Lingkungan dalam Menetapkan Kelayakan dan Pembobotan Kredit REDD+ Suatu Kawasan | Universitas Hasanuddin, Makassar |
| Prof. Baharuddin Nurkin | Moderator | Universitas Hasanuddin, Makassar |
| Dr. Sitti Marwah | Penilaian Simpanan Karbon Vegetasi pada System Agroforestry di DAS Konawehea, Sulawesi Tenggara | Universitas Haluoleo, Kendari |
| Dr. Agus Kastanya | Moderator | Universitas Pattimura, Ambon |
| Dr. Debby V. Pattimahu | <i>The Need of Humanosphere Research Collaboration to Salvage Maluku Biodiversity Through REDD+ Program Implementation</i> | Universitas Pattimura, Ambon |
| Prof. Dr. Deddy Hadriyanto | <i>The potential of ALOS PALSAR to identify above-ground biomass of degraded tropical forests: A case study in East Kalimantan</i> | Universitas Mulawarman, Samarinda |
| Dr. Fajar Pambudhi | Biomassa dan Serapan karbon Hutan Bekas Tebangan Di Kalimantan Timur | Universitas Mulawarman, Samarinda |
| Prof. Dr. Udiansyah | Moderator | Universitas Lambung Mangkurat, Kal-Sel |
| Dr. Dwi Astiani | <i>Carbon assesments in West Kalimantan</i> | Universitas Tanjung Pura, Pontianak |
| Prof. Dr. I Nengah Surati J | Road Map MRV Kehutanan | Institut Pertanian Bogor, Bogor |
| Dr. Buce Saleh | Pendugaan dan Pemetaan Biomassa atas Permukaan pada Tegakan Pinus dan Tegakan Jati Menggunakan Citra Alos Palsar Resolusi Spasial 50 M dan 12,5 M | Institut Pertanian Bogor, Bogor |
| Dr. Abdul Rauf | Moderator | Universitas Tadulako, Palu |
| Ida Ningsih | Moderator | Universitas Tadulako, Palu |
| Livawati, MS | Moderator | Universitas Muhammadiyah, Palu |
| Dr. Golar, S.hut | Moderator | Universitas Tadulako, Palu |
| Dr. Henry Barus | Moderator | Universitas Tadulako, Palu |
| Dr. Mathew Brown | Moderator | Universitas Tadulako, Palu |

Peneliti Muda di Sulawesi Tengah

Berbagai forum negosiasi tentang mekanisme penurunan tingkat emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan (*reducing emissions from deforestation and forest degradation* atau REDD+) telah memunculkan isu-isu yang memerlukan penelitian secara mendalam, baik yang diadakan di negara maju maupun berkembang. Penelitian ini dilakukan dari berbagai sudut pandang, antara lain dari segi teknis, sosial, ekonomi, politik, budaya, keamanan, dan korupsi.



▲ Nina (tengah, berdiri), dan Ima (tengah, berjongkok) mengikuti salah satu kegiatan Pokja REDD+ Sulawesi Tengah

Provinsi Sulawesi Tengah sebagai provinsi percontohan UN-REDD Programme Indonesia juga telah mendapat perhatian dari para peneliti, tak terkecuali dari manca negara. Pada kuartal III tahun ini, dua peneliti muda melakukan penelitian terkait kegiatan REDD+ di Sulawesi Tengah untuk kebutuhan tesis mereka. Nina Gaiser dari Universitas Eberswalde (Jerman) dan Ima Yudin Rayaningtyas, staf Kementerian Kehutanan Republik Indonesia yang sedang menyelesaikan program masternya di Universitas Hiroshima (Jepang), terjun langsung ke lapangan dan melihat lebih dekat, khususnya kegiatan UN-REDD

Programme Indonesia di Sulawesi Tengah.

Untuk mengenal kegiatan-kegiatan Kelompok Kerja (Pokja) REDD+ Sulawesi Tengah dengan lebih baik, Nina Gaiser menetap di Palu dan berpartisipasi di kegiatan-kegiatan UN-REDD Programme Indonesia. Nina memfokuskan penelitiannya pada dinamika REDD+ di Sulawesi Tengah, terutama pada interaksi antar pemangku kepentingan yang terlibat di kegiatan REDD+, peran-peran, serta tanggung jawab mereka. Sampai saat ini Nina masih mengumpulkan data melalui wawancara dan survei terhadap para pemangku kepentingan yang ber-

beda di kegiatan-kegiatan REDD+ di Sulawesi Tengah.

Di sisi lain, Ima Yudin Rayaningtyas yang sementara ini sudah kembali ke Jepang juga mendapat kesempatan yang sama mengikuti kegiatan UN-REDD Programme Indonesia di Palu. Ima memanfaatkan kesempatan itu untuk melakukan wawancara dan membagikan angket ke beberapa anggota Pokja REDD+ Sulawesi Tengah. Diharapkan hasil-hasil penelitian semacam ini dapat menjadi hikmah pembelajaran untuk meningkatkan kualitas program REDD+ di Indonesia.

Mengkomunikasikan REDD+ dalam Uji Coba Panduan Persetujuan atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan

Sejalan dengan proses pemilihan kabupaten percontohan di Provinsi Sulawesi Tengah, Kelompok Kerja IV (Pokja IV) REDD+ Sulawesi Tengah yang membidangi Persetujuan atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (*Free, Prior and Informed Consent* atau FPIC), Pemberdayaan, dan Pembangunan Kapasitas di masyarakat lokal, bersiap-siap mengimplementasikan FPIC di kabupaten terpilih. Sesuai dengan tujuannya, FPIC berusaha memberikan informasi yang sejelas-jelasnya kepada

masyarakat agar masyarakat mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan informasi itu sebelum program dilaksanakan. Untuk itulah, Pokja IV yang diketuai Bapak Syafri Alikadri, SH. bersama timnya yang salah satunya adalah Ibu Rukmini P. Toheke, menyusun Panduan FPIC.

Panduan yang disusun oleh Pokja IV ini berupaya menjamin masyarakat adat dan masyarakat lokal menjalankan hak-hak fundamentalnya. Tercakup dalam Panduan itu adalah metodologi terkait

komunikasi dengan masyarakat adat dan masyarakat lokal agar mereka memahami dengan jelas konsep REDD+, serta dampak dan keuntungannya. Pokja IV merasa pentingnya sarana-sarana komunikasi yang sederhana dan tepat sasaran, dalam arti sesuai konteks dan budaya masyarakat, serta memenuhi kebutuhan masyarakat atas informasi tersebut. Panduan ini sudah dipresentasikan dan dibahas di diskusi kelompok terpadu (Palu, 18 Oktober 2011), untuk selanjutnya akan diujicobakan di tingkat tapak.

Kunjungan Kerja Pemerintah Daerah Sumatera Barat Ke Palu

Sulawesi Tengah sebagai salah satu provinsi percontohan yang ada di Indonesia ternyata mendapat perhatian dari provinsi lain, salah satunya adalah Sumatera Barat. Selama ini, Pemerintah Daerah (Pemda) Sumatera Barat belum banyak terlibat dalam kegiatan REDD+ di Indonesia. Informasi tentang REDD+ yang diterima oleh Pemda Sumatera Barat masih belum lengkap dan cenderung membingungkan. Banyak pihak luar yang datang ke Pemda Sumatera Barat menyampaikan janji yang menarik tentang REDD+, khususnya tentang perdagangan karbon. Menurut Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Ir. Hendri Octavia, MSc., satu hal yang menarik bagi Pemda Sumatera Barat adalah potensi perdagangan karbon sebagai salah satu solusi untuk mempertahankan hutan di wilayah Sumatera Barat sekaligus menjadi sumber pendapatan daerah.

Untuk memahami REDD+ dan provinsi percontohnya, Tim Pemda Sumatera Barat melakukan kunjungan kerja ke

Palu, Sulawesi Tengah, pada tanggal 7 Juli 2011. Tim Pemda Sumatera Barat ini terdiri dari utusan berbagai instansi penting di Sumatera Barat, antara lain Dinas Kehutanan, Dinas Pendapatan Daerah, Kantor Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), termasuk pihak swasta. Tujuan utama kunjungan kerja ini adalah mendapatkan gambaran nyata tentang langkah-langkah yang harus diambil oleh Pemda dalam menghadapi isu perdagangan karbon. Provinsi Sulawesi Tengah menjadi pilihan untuk pelaksanaan kunjungan kerja ini karena dari berbagai informasi yang diperoleh oleh Pemda Sumatera Barat, Sulawesi Tengah merupakan salah satu provinsi percontohan yang cukup maju dalam mempersiapkan diri menghadapi

implementasi REDD+ di Indonesia, terutama dalam hal keterlibatan pemangku kepentingan multipihak.

Ketua Kelompok Kerja (Pokja) REDD+ Sulawesi Tengah, para ketua keempat Sub-Pokja, juga perwakilan dari Sekretariat UN-REDD Programme Indonesia Jakarta, memberikan presentasi singkat ke Tim Pemda Sumatera Barat di Palu. Diharapkan pertemuan ini menambah wawasan Tim Pemda Sumatera Barat melalui informasi yang lebih lengkap tentang status perkembangan mekanisme REDD+ di Indonesia dan di dunia internasional, sehingga Provinsi Sumatera Barat siap memasuki wacana mekanisme REDD+ untuk ditindaklanjuti secara nyata.



▲ Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Ir. Hendri Octavia, MSc., (tengah) berpartisipasi dalam diskusi pada acara kunjungan

Penilaian Pengembangan Kapasitas

Kesiapan (*readiness*) REDD+ dapat dibangun oleh para pemangku kepentingan apabila ada pemahaman serta kapasitas yang memadai. Oleh karenanya, identifikasi kedua hal tersebut menjadi perhatian utama dalam kegiatan Penilaian Pembangunan Kapasitas (*Capacity Development Assessment/CDA*). Kegiatan CDA di Sulawesi Tengah difasilitasi oleh Ashley Palmer, *Capacity Development Specialist* dari United Nations Development Programme (UNDP) *Asia-Pacific Regional Centre*, Bangkok, Thailand. Selama dua hari di Palu (9 – 10 November 2011) dan sehari di Bogor (11 November 2011), Ashley melakukan serangkaian diskusi dengan beberapa pemangku kepentingan Sulawesi Tengah, antara lain instansi terkait di tingkat provinsi dan kabupaten, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat,

komunitas lokal, media cetak dan elektronik, serta Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia.

Kegiatan CDA bulan November itu merupakan kegiatan awal yang mencakup penentuan ruang lingkup penilaian dan diskusi mengenai tantangan yang dihadapi dalam menyongsong implementasi REDD+. Harapan utama dari beberapa pemangku adalah keberlanjutan dari proses kesiapan REDD+ di tahun mendatang. Untuk itu, diperlukan kelembagaan yang jelas untuk pengelolaan kegiatan REDD+ nantinya. Oleh sebab itu, CDA akan menata peran dan mekanisme kelembagaan ini agar bisa melekat pada pemangku kepentingan yang ada, tentunya dengan penguatan-penguatan, untuk menyongsong implementasi REDD+ di tingkat sub-nasional.



▲ Diskusi CDA di Bogor dengan Pokja IV



▲ Diskusi CDA di Palu, dari kiri ke kanan: Ashley Palmer, CDA Specialist UNDP; Agus Hernadi, Team Leader Bidang Pembangunan Kapasitas di Tingkat Sub Nasional; Ir. H. Nahardi, MM, Kepala Dinas Kehutanan Sulawesi Tengah

Partisipasi Provinsi Sulawesi Tengah di COP17, Durban, Afrika Selatan



Keterlibatan Indonesia di UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) memiliki nilai strategis yang tinggi. Delegasi Republik Indonesia (RI) untuk Konferensi Para Pihak UNFCCC ke-17 (Conference of the Parties/COP17) di Durban, Afrika Selatan (28 November – 9 Desember 2011), melalui Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI), menegaskan komitmen Indonesia dalam upaya internasional mitigasi perubahan iklim, antara lain dengan mendirikan Pavilion Indonesia di forum ekshibisi COP17.

Pavilion Indonesia menampilkan tema REDD+ (*reducing emissions from deforestation and forest degradation plus* atau penurunan tingkat emisi gas rumah kaca (GRK) akibat deforestasi dan degradasi hutan) pada tanggal 1 Desember 2011. Sebagai wujud komitmen Sulawesi Tengah dalam mensukseskan program nasional REDD+, Gubernur Sulawesi Tengah, Drs. H. Longki Djanggola, M.Si, berpartisipasi

di Pavilion Indonesia COP17, didampingi Kepala Dinas Kehutanan, Ir. H. Nahardi, MM dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Ir. B. Elim Somba MSc. Pada tanggal 1 Desember, Gubernur menyampaikan kesiapan Provinsi

Sulawesi Tengah dalam berkontribusi pada target penurunan emisi GRK nasional 26% tahun 2020. Dengan dukungan UN-REDD Programme Indonesia dan partisipasi para pemangku kepentingan di Provinsi, Sulawesi Tengah yang merupakan provinsi percontohan UN-REDD Programme Indonesia optimis dengan perhitungan kontribusi penurunan emisi Provinsi sebanyak 3% dari target sektor kehutanan nasional



▲ Suasana sidang hari pertama COP17 di Durban, Afrika Selatan

sebanyak 14%. Dukungan pemerintah provinsi dimotori oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah yang mendapat mandat dari Gubernur Sulawesi Tengah untuk menyongsong kesiapan REDD+ melalui pelibatan semua pemangku kepentingan. Di samping itu, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah menjalankan fungsi koordinasi antar-sektor di berbagai tingkatan pemangku kepentingan.

Hubungi kami :

Gedung Manggala Wanabakti
Blok IV, Lantai 5, Ruang 525C
Jalan Jenderal Gatot Subroto
Jakarta 10270
Telepon: +62 21 5795 1505
Faks: +62 21 574 6748

atau silakan kirim e-mail ke:
nanda.febriani@un-redd.or.id

Untuk informasi lebih lanjut tentang
UN-REDD Programme Indonesia
kunjungi : www.un-redd.or.id

Kerja sama antara:



UN-REDD
PROGRAMME
The United Nations Collaborative Programme
on Reducing Emissions from Deforestation and
Forest Degradation in Developing Countries